

BAB II

IDENTITAS DALAM INTERSUBJEKTIVITAS STRUKTUR DAN AGEN

Merujuk pada penjelasan yang ada di latar belakang dan landasan konseptual di bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menjelaskan ideologi dari struktur dan agen yang Sesuai dengan teori konstruktivisme menurut Alexsander Wendt bahwa struktur dan agen akan saling mempengaruhi dalam menentukan sebuah kebijakan. Dalam intersubjektifitas antar agen akan ditemukan pandangan atau identitas dalam diri aktor terhadap aktor lain dan menciptakan kepentingan serta kebijakan (Wendt A. , 1994, hal. 388). Pemahaman tersebut dibutuhkan sebagai upaya dalam menganalisis sikap Jerman terhadap Turki.

Secara teknis bab ini akan dibagi dalam dua pembahasan yang pertama, struktur internasional yaitu institusi yang terbentuk dengan identitas kolektif. Struktur internasional yang dimaksud pada penelitian ini adalah Uni Eropa. *Collective identity* yang terbentuk di Uni Eropa perlu dipahami untuk menganalisa pengaruh intersubjektivitas agen dalam struktur. Kedua, Identitas dalam intersubjektivitas antar agen yaitu Jerman dan Turki. Pembahasan ini diperlukan karena identitas agen merupakan ideologi atau nilai nilai yang dipercayai dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan baik dalam maupun luar negeri.

2.1 Struktur *Collective Identity* Uni Eropa

Teori Konstruktivisme menyatakan bahwa struktur merupakan dunia sosial atau kehidupan internasional yang melibatkan aktor aktor berupa negara maupun non

negara dengan segala bentuk interaksinya (Jakson, Robert, George, 2005, hal. 307). Identitas kolektif yang terbentuk dalam struktur internasional akan mempengaruhi perilaku para agen dan hanya agen yang cukup kuat yang mampu mengubah identitas dari struktur tersebut. Struktur dibentuk oleh agen-agen yang kemudian antara struktur dan agen akan saling mempengaruhi walaupun saat struktur telah terbentuk maka pengaruhnya akan sangat besar bagi para agen (Wendt A. E., 1987, hal. 335).

Faktor penting yang membuat Uni Eropa terbentuk adalah Kehancuran dunia akibat perang dunia II yang menciptakan ketakutan tersendiri bagi setiap negara dalam mempertahankan keberlangsungan negara. Beberapa pemimpin negara di Eropa mencari cara untuk perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan. Ketakutan akan ancaman terjadinya konflik masa depan yang dialami bersama menciptakan ide ide untuk membentuk rasa aman dari setiap negara. Dari keinginan tersebut munculah ide untuk mempersatukan Eropa menjadi kawasan federal yang mampu menjaga keamanan bersama. Persatuan kawasan tersebut dimulai dengan usulan kerjasama produksi batu bara dan baja pada tahun 1950 oleh perdana menteri Perancis Robert Schuman di Eropa Barat. Didirikanlah sebuah organisasi untuk tujuan tersebut bersama Jerman secara bilateral namun terbuka untuk negara lain, sehingga pada tahun berikutnya enam negara di eropa yaitu: Belgia, Perancis, Jerman Barat, Italia, Luksemburg dan Belanda mendirikan sebuah organisasi bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC). Pada tahun 1957 Perjanjian Roma telah menciptakan institusi baru yaitu: *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (Euratom). Dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang

ekonomi, pada tahun 1967 ketiga institusi tersebut secara resmi bergabung kedalam *European Community* (EC) (CIA, 2016). Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara negara di Eropa tersebut telah menciptakan ketergantungan antar negara yang terus meningkat dengan terbentuknya institusi kerja sama berbasis ekonomi.

Runtuhnya Tembok Berlin dan bersatunya Jerman Barat-Jerman Timur pada tanggal 3 Oktober 1990 yang diikuti lepasnya kontrol Uni Soviet dikawasan Eropa dan semakin tingginya demokratisasi di Eropa Tengah dan Timur serta desintegrasi Uni Soviet tahun 1991, membuat paham liberal semakin kuat. Negara negara di Eropa semakin merekatkan hubungannya, sehingga terciptalah traktat baru yang disebut *Treaty on European Union* (TEU) pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastricht. Munculnya traktat baru tersebut kemudian mengubah organisasi *European Community* menjadi *European Union* (Uni Eropa, UE). Perubahan nama organisasi tersebut menjadi awal dari sebuah tatanan internasional yang baru karena organisasi sebelumnya fokus pada kerjasama ekonomi, sedangkan UE memiliki kesepakatan internasional yang lebih luas dengan perjanjian perjanjian yang diperbaharui. UE memodifikasi kesepakatan kerjasama ekonomi dari EC dan menambah perjanjian dalam bidang hukum dan keamanan (European Union, 2018).

Treaty of Rome pada tahun 1957 dalam pembentukan EEC memiliki empat tujuan utama yaitu: bebasnya arus perdagangan, buruh, modal dan pelayanan di kawasan Eropa namun tujuan tujuan tersebut baru dapat disempurnakan di UE. Dengan sistem *single market*, negara negara anggota dapat menghilangkan

kesenjangan sosial dan menciptakan satu mata uang bersama yaitu Euro. Keuntungan dari dibentuknya *single market* ini adalah meluasnya lapangan pekerjaan karena orang-orang dapat bepergian dengan bebas dari satu negara ke negara lain di Eropa, dan adanya mata uang tunggal dapat menghilangkan fluktuasi nilai tukar mata uang antar negara dan biaya pertukarannya di kawasan Eropa (Thompson, 2007, hal. 273-291)

Terbentuknya *collective identity* telah menciptakan nilai dan prinsip sebagai *self restraint* Uni Eropa untuk membatasi negara dalam menjalankan kebijakan domestik dan internasional serta program-program Uni Eropa agar sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Salah satu hasil kesepakatan dalam EU adalah Tiga Pilar Uni Eropa yang isinya adalah (Arfin and Nuraeni and Deasy, 2017, hal. 144): 1) Ekonomi: penyatuan ekonomi dan moneter atau pasar tunggal Eropa (*Economic and Monetary Union/EMU*), 2) Politik: kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (*Common Foreign and Security Policy/CFSP*), 3) Sosial-hukum: masalah peradilan dan masalah dalam negeri (*Justice and Home Affairs/JHA*).

Uni Eropa tidak hanya menyatukan kawasan Eropa dan menciptakan kesejahteraan di kawasan saja namun juga berusaha mempromosikan nilai serta tujuan Uni Eropa untuk menciptakan perdamaian di luar kawasan. Tujuan dan nilai Uni Eropa disusun dalam perjanjian Lisbon dan Piagam Uni Eropa. Nilai dan tujuan dari Uni Eropa adalah sebagai berikut (European Union, 2018):

Tujuan dibentuknya Uni Eropa adalah:

1. Mempromosikan perdamaian, nilai-nilai dan kesejahteraan warganya,
2. Menawarkan kebebasan, keamanan, dan keadilan tanpa adanya batas negara,
3. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabilitas ekonomi pasar, lapangan pekerjaan yang luas dan kemajuan sosial serta memperhatikan kesejahteraan lingkungan hidup,
4. Memerangi diskriminasi,
5. Menghormati keanekaragaman budaya dan bahasa,
6. Membentuk pasar tunggal dengan mata uang bersama yaitu Euro.

Nilai-nilai Uni Eropa Uni Eropa:

1. *Human dignity*, Menghormati dan melindungi martabat manusia karena merupakan hak fundamental seseorang.
2. *Freedom*, Memberi hak kepada warga untuk bergerak dan tinggal dengan bebas didalam perhimpunan. Menghargai kebebasan individu seperti menghormati kehidupan pribadi, kebebasan berpikir, beragama, berkumpul, berekspresi serta kebebasan mencari informasi. Hal tersebut dilindungi oleh Piagam Uni Eropa tentang Hak Fundamental.
3. *Democracy*, Fungsi Uni Eropa dijalankan berdasarkan demokrasi melalui perwakilan dari setiap negara anggota. Setiap warga Uni Eropa memiliki hak politik untuk menjadi kandidat dan memberikan suara pada pemilihan Parlemen Uni Eropa.

4. *Equality*, Kesetaraan dan persamaan hak untuk warga negara dihadapan hukum.

Prinsip kesetaraan baik perempuan maupun laki laki untuk mendukung segala kebijakan pemerintah yang merupakan dasar bagi integrasi Eropa dan berlaku disemua area. Prinsip upah yang sama bagi setiap pekerja yang memiliki pekerjaan yang sama. Meskipun ketidak setaraan di Eropa masih ada namun Uni Eropa telah membuat peningkatan yang signifikan.

5. *Rule of law*, Pemerintahan Uni eropa dijalankan berdasarkan aturan hukum. Segala

sesuatu yang dilakukan Uni Eropa didasarkan pada perjanjian, voluntarily, dan demokratis yang disepakati oleh negara anggota Uni Eropa. Hukum dijunjung tinggi oleh pengadilan yang independen. Negara anggota memberikan yurisdiksi final kepada pengadilan Eropa dan keputusannya harus dihormati oleh semua pihak.

6. *Human Rights*, Hak Asasi Manusia dilindungi oleh Piagam Uni Eropa tentang Hak

Fundamental yang mencakup hak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar Jenis kelamin, ras atau etnis, agama atau keyakinan, kecacatan, usia atau orientasi seksual, hak atas perlindungan data pribadi dan atau hak untuk mendapatkan akses keadilan.

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang menyatukan kedaulatan masing masing negara dalam organisasi. Sebagian kedaulatan negara tetap dipertahankan yang merupakan bentuk dari sifat egois sebuah negara karena jika kedaulatan diserahkan sepenuhnya terhadap Uni Eropa, maka negara tidak lagi memiliki *d'etre* (alasan sebuah keberadaan). Keputusan Uni Eropa yang

merepresentasikan seluruh negara-negara anggota tersebut dilakukan dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa lembaga. Dari banyaknya lembaga yang didirikan oleh Uni Eropa, terdapat Tiga lembaga utama sebagai berikut: 1) *European Parliament* yaitu Parlemen Eropa yang terdiri dari warga Uni Eropa dan dipilih langsung oleh masyarakat, 2) *Council of European Union* yaitu Dewan Uni Eropa yang terdiri dari perwakilan masing masing negara anggota 3) *European Commission* yaitu Komisi Eropa yang didirikan untuk menegakkan prinsip dan kepentingan Uni Eropa secara menyeluruh. Ketiga lembaga tersebut merupakan institusi yang menghasilkan Undang-Undang yang berlaku diseluruh Uni Eropa (EEAS, 2017).

Struktur organisasi Uni Eropa dan prinsip-prinsip yang terbentuk menciptakan integrasi masyarakat yang dikenal saat ini sebagai masyarakat eropa. Integrasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga masyarakatnya. Sistem single market yang berhasil diterapkan membuat kehidupan sosial antar masyarakat dinegara negara anggota semakin tinggi. Komunikasi tersebut menciptakan integrasi ekonomi, budaya, dan ideologi yang kemudian menjadi identitas kolektif. Konsep struktur internasional dalam teori konstruktivisme menurut Alexander Wendt berhasil di terapkan dikawasan tersebut. Menciptakan sebuah institusi yang mengatur kehidupan internasional yang lebih tinggi namun tidak membuat negara kehilangan kedaulatan secara penuh. Konflik di satu negara akan mengganggu stabilitas kawasan lebih cepat mengingat arus mobilisasi internasional yang tinggi dan sistem ekonomi bersama. Interaksi antar agen di Uni Eropa menciptakan hubungan yang saling memperkuat identitas dan ketergantungan.

sehingga meminimalisir terjadinya konflik karena adanya kepentingan bersama yang harus dijaga.

2.1.1 Prosedur Menjadi Anggota Uni Eropa

Uni Eropa membuat prosedur persetujuan bagi negara yang ingin menjadi anggota uni Eropa dengan memastikan terlebih dahulu calon anggota baru dapat menunjukkan bahwa mereka mampu memainkan peran mereka sepenuhnya sebagai anggota, yaitu dengan (European Commission, 2018):

1. Mematuhi semua standar dan aturan Uni Eropa.
2. Memiliki persetujuan dari lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa.
3. Memiliki persetujuan warga negara mereka yang diputuskan melalui persetujuan di parlemen nasional negara yang bersangkutan atau melalui referendum.

Perjanjian tentang Uni Eropa menyatakan bahwa setiap negara Eropa dapat mengajukan diri menjadi calon anggota apabila dapat menghormati nilai-nilai demokrasi Uni Eropa dan berkomitmen untuk mempromosikannya. Langkah pertama bagi calon anggota Uni Eropa adalah dengan memenuhi kriteria utama yang disusun oleh Dewan Eropa di *copenhagen* pada tahun 1993 dan karenanya disebut sebagai '*copenhagen criteria*'. Kriteria tersebut menyatakan bahwa negara negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa harus memiliki indikator sebagai berikut: 1) Lembaga yang stabil dan mampu menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia

dan menghormati serta melindungi masyarakat minoritas, 2) Ekonomi pasar yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi persaingan dan kekuatan pasar di Uni Eropa, 3) Kemampuan untuk mengambil dan menerapkan secara efektif kewajiban keanggotaan, termasuk kepatuhan terhadap tujuan serikat politik, ekonomi dan moneter (European Commission, 2018).

Uni Eropa menerapkan kriteria tambahan bagi negara negara Eropa di Balkan Barat yang ingin menjadi negara anggota yaitu dengan melalui '*Stabilisation and Association process*' yang disebut dengan *Acquis criteria*. Kriteria tersebut adalah proses stabilisasi dan negosiasi untuk menerapkan aturan aturan Uni Eropa kedalam negara calon anggota. Negosiasi dilakukan untuk menentukan kondisi dan waktu calon anggota, implementasi dan penegakan aturan Uni Eropa, pada tabel 2.1 tertera daftar 35 bidang kebijakan dari kriteria *Acquis* yang dibahas satu persatu untuk disetujui oleh Dewan Uni eropa. Selain 35 bab tersebut, negosiasi juga membahas terkait pengaturan keuangan dan transisional ataupun pengaturan tertentu yang dibutuhkan secara khusus bagi negara tertentu yang memiliki kasus berbeda. Selama proses negosiasi, Uni Eropa melakukan pengawasan oleh lembaga-lembaga didalam Uni Eropa dan dipantau oleh Komisi Uni Eropa terkait kemajuan calon anggota dalam menjalankan Undang Undang Uni Eropa dan memenuhi komitmen lainnya (European Commission, 2018).

Chapter of Acquis Criteria	
Chapter 1:	Free movement of goods
Chapter 2:	Freedom of movement for workers

Chapter 3:	Right of establishment and freedom to provide services
Chapter 4:	Free movement of capital
Chapter 5:	Public procurement
Chapter 6:	Company law
Chapter 7:	Intellectual property law
Chapter 8:	Competition policy
Chapter 9:	Financial services
Chapter 10:	Information society and media
Chapter 11:	Agriculture and rural development
Chapter 12:	Food safety, veterinary and phytosanitary policy
Chapter 13:	Fisheries
Chapter 14:	Transport policy
Chapter 15:	Energy
Chapter 16:	Taxation
Chapter 17:	Economic and monetary policy
Chapter 18:	Statistics
Chapter 19:	Social policy and employment
Chapter 20:	Enterprise and industrial policy
Chapter 21:	Trans-European networks
Chapter 22:	Regional policy and coordination of structural instruments
Chapter 23:	Judiciary and fundamental rights
Chapter 24:	Justice, freedom and security
Chapter 25:	Science and research
Chapter 26:	Education and culture
Chapter 27:	Environment
Chapter 28:	Consumer and health protection
Chapter 29:	Customs union
Chapter 30:	External relations
Chapter 31:	Foreign, security and defence policy
Chapter 32:	Financial control
Chapter 33:	Financial and budgetary provisions
Chapter 34:	Institutions
Chapter 35:	Other issues

Table 1. *chapter of Acquis Criteria* (European commission, 2016)

2.2 Intersubjektivitas Agen Jerman dan Turki

Interaksi antar agen dapat menciptakan identitas sosial yang beragam. Seperti yang dikatakan dalam teori konstruktivisme, bahwa interaksi antar agen akan menciptakan kondisi yang *cooperate* atau *conflictual* (Wendt A. , 1994, hal. 385-386). Hubungan Jerman dan Turki sejauh ini telah menciptakan hubungan kerja sama yang cukup intens. Jerman sebagai agen dapat memiliki identitas yang beragam sebagai aktor negara yang memiliki sifat egois. Dalam konteks penelitian ini, alasan Jerman menolak Turki menjadi anggota penuh di Uni Eropa membuat Jerman mengatributkan dirinya sebagai ‘kami’ dalam hal *collective identity* di Uni Eropa atau identitasnya sebagai “saya” dalam hubungan bilateralnya. Meski Jerman dan Turki dapat bersama di dalam organisasi NATO, namun saat Jerman mendefinisikan identitasnya sebagai bagian dari *collective identity* Uni Eropa, maka identitasnya dalam melihat Turki akan berubah sesuai kepentingan yang terbangun dalam interaksinya.

Jauh sebelum Uni Eropa terbentuk, hubungan bilateral Jerman dan Turki telah terbentuk dengan baik. Hubungan bilateral antara Turki dan Jerman bermula saat Turki dipimpin oleh Sultan Hamid II yang memberlakukan kebijakan modernisasi dalam bidang militer dengan mendatangkan tentara-tentara Prusia (negara sebelum Jerman) untuk melatih tentara Turki (Makkawaru, 2006, hal. 242). Selain itu pada tahun 1882 Turki mengizinkan Jerman melakukan investasi di Turki dengan melakukan pembangunan jalan kereta dari Berlin hingga Istanbul dan diperluas sampai ke Baghdad dan Teluk Persia (Schapiro, 1964, hal. 635).

Persahabatan Jerman dan Turki terus berlanjut bahkan dalam urusan domestik di Turki seperti saat Sultan Hammid II ingin melakukan kebijakan Pan Islamisme yang didukung oleh sultan Jerman yaitu Willhem II dengan menyatakan dirinya sebagai sahabat 300 juta umat muslim (Eversley, 1958, hal. 185). Perjanjian demi perjanjian dibentuk antara Jerman dan Turki dalam membuat hubungan keduanya terikat satu sama lain, hingga pada saat Jerman menyatakan perang dengan Rusia dan Perancis. Pada 1 November 1914 Turki Usmani menyatakan dirinya sebagai sekutu Jerman (Curran, 1997, hal. 436).

Kekalahan di Perang Dunia I membuat Jerman dan Turki mengalami kerugian besar dalam berbagai bidang sehingga keduanya fokus untuk memperbaiki kondisi negaranya. Jerman melakukan revolusi dari kerajaan ke parlementer pada tahun 1918 (Wilde, 2018) dan Turki melakukan revolusi yang sama pada tahun 1923 (BBC, 2016). Kegagalan dalam PD I tidak membuat kedua negara memutuskan hubungan bilateralnya. Revolusi Turki dilakukan dengan perubahan dalam gaya politik dan sosial yang mengadopsi gaya Eropa membuatnya justru semakin dekat dengan Jerman. Pada perang dunia 2 keterlibatan Turki tidak terlalu signifikan karena kemampun militernya yang sudah berkurang, Pasca PD II, Jerman membutuhkan banyak pekerja untuk kembali membangkitkan ekonominya, salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan Turki untuk mendatangkan pekerja dari Turki pada tahun 1961, arus migrasi tersebut membuat banyak warga Turki yang kemudian menetap di Jerman sampai saat ini (Yudho, 2012).

Kerja sama bilateral Jerman dan Turki terus berlanjut dengan baik, faktor sejarah membuat kedua negara tersebut tetap menjalin hubungan dengan baik dalam berbagai bidang terutama ekonomi dan militer. Perubahan dalam hubungan bilateral yang terjadi antara Jerman dan Turki merupakan fenomena baru yang terjadi sejak Turki menjadi calon anggota Uni Eropa. Meski menuai konflik, hubungan bilateral masih terus berjalan karena kedua negara memiliki banyak kesepakatan dalam kerja sama dan kondisi geografis Turki serta kemajuan Jerman membuat keduanya saling membutuhkan. Konflik yang muncul merupakan efek dari pencalonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dan perubahan politik di Turki.

Kerja sama secara bilateral adalah kebijakan Jerman yang mengidentifikasi dirinya sebagai “saya” secara individual, oleh karenanya Jerman dapat mengeluarkan kebijakannya dengan kepentingan untuk saling menguntungkan sesuai kesepakatan kedua negara. Berbeda dengan akses Turki ke Uni Eropa, Jerman mengidentifikasi dirinya sebagai “kami” dalam konsep *collective identity* Uni Eropa, oleh karenanya Jerman tidak dapat bersikap secara egois untuk mendapatkan keuntungan dari Turki. Jerman harus mempertimbangkan kondisi dan pendapat negara anggota lainya serta kemungkinan keuntungan dan kerugian bagi UE apabila Turki resmi menjadi anggota Uni Eropa. Terdapat banyak pertimbangan dari Jerman untuk menyetujui Turki menjadi anggota Uni Eropa oleh sebab itu pandangan Jerman terhadap Turki dapat berbeda saat Jerman mengidentifikasi dirinya sebagai “saya” atau “kami”.

2.2.1 Identitas Jerman

Republik Federal Jerman merupakan negara federal yang memiliki 16 negara bagian dengan sistem pemerintahan Parlemen Federal dan merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Eropa (CIA, 2018). Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I membuat negara tersebut dikuasai oleh partai NAZI yang menjalankan politik dengan gaya otoriter dan menyebabkan Jerman mengalami tingkat inflasi serta pengangguran yang tinggi dan jutaan orang yahudi terbunuh selama Holocaust. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jerman terpecah menjadi dua bagian yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur (Lane, 2001). Kekalahan Uni Soviet pada Perang Dingin membuat paham Komunis di Eropa semakin lemah sehingga Jerman Timur juga melakukan perubahan dinegaranya untuk menyatukan diri dengan Jerman Barat. Reunifikasi Jerman resmi dilakukan pada tahun 1990 (Britannica, 2018).

Dalam memperbaiki citranya di dunia internasional, Jerman sangat aktif dalam memperomosisikan kebijakan luar negerinya. Jerman membantu negara-negara yang mengalami masalah terorisme, HAM, dan perang, seperti kebijakan Jerman yang mengirimkan pasukannya ke Afghanistan, Kongo dan Libanon pada tahun 1990an (Mair, 2006). Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Jerman memiliki fokus dalam masalah demokrasi di dunia internasional, yaitu: masalah radikalisme, terorisme, otoritarian, apatis dan ketidakpedulian terhadap negara lain (Utatowski, 2015, hal. 140-142). Konsep ketergantungan antar negara diadopsi oleh Jerman, ketakutan akan terjadinya perang membuatnya menerima

negara bekas musuh seperti Perancis untuk menjalin kerja sama dibanding menaklukan negara tersebut. Jerman bersama negara negara lain kemudian membentuk organisasi kerja sama yang saat ini dikenal Uni Eropa sebagai identitas kolektif negara negara di Eropa (Brie, 2018).

Identitas dalam Collective identity Uni Eropa

Identitas kolektif dalam Uni Eropa yang diyakini Jerman sendiri merupakan peradaban tunggal yang diciptakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa. Identitas kolektif ini juga didasari pada posisi geografis dalam satu kawasan benua Eropa. Intersubjektivitas Jerman dan negara negara lain di Eropa menciptakan kesatuan tatanan nilai, prinsip dan budaya. Jerman sendiri dikuasai oleh Partai berhaluan demokrasi liberal yaitu koalisi *Demokratische Union Deutschlands/ Christian Social Union Bavaria* dan *Sozial Demokratische Partei Deutschlands* (CDU/CSU-SPD) yang menjalankan politik luar negeri dengan lebih menekankan nilai nilai dalam Uni Eropa. Arah kebijakan luar negeri Republik Federal Jerman terus berperan melalui berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah masalah di tingkat global secara aktif bersama negara negara Eropa lainnya. Presiden Steinmeier menyampaikan beberapa pokok penting terkait arah politik luar negeri Jerman kedepannya dalam pidato pertamanya sebagai presiden. Menurut Steinmeier tantangan yang dihadapi dunia maupun Eropa saat ini cukup berat seperti perkembangan politik yang terjadi di Amerika Serikat, Perancis, Rusia, dan Turki. penekanan politik luar

negerinya terhadap Turki menjadi bukti bahwa Jerman tidak dapat berpaling dari apa yang terjadi di Turki (Der Bundespräsident, 2017).

Jerman merupakan aktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan organisasi Uni Eropa. Seperti yang dikatakan dalam teori Konstruktivisme bahwa suatu negara akan mampu mengubah atau mempengaruhi struktur jika negara tersebut mampu untuk melakukannya (Wendt A. E., 1987). Jerman sendiri memiliki posisi yang sangat penting di Uni Eropa. Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa dan merupakan negara penyumbang dana terbesar bagi Uni Eropa. Tercatat bahwa pada tahun 2017, total kontribusi Jerman terhadap Uni Eropa adalah sebesar €19.587.000.000 diikuti oleh Perancis diposisi kedua sebesar €16.233.900.000, dan Polandia diposisi ketiga sebesar €11.921.300.000 (Revelin, 2018). Kepemimpinan Jerman di Uni Eropa selama beberapa dekade ini menjadi kekuatan yang dominan. Kekuatan Jerman di Eropa semakin tinggi sejak keluarnya Inggris dari organisasi tersebut (Gardiner, 2015). Angela Merkel sebagai kanselir Jerman menjadi tokoh penting di Uni Eropa sejak tahun 2005 dan terus bertahan sampai saat ini (Kirschbaum, 2017).

Pemerintah baru Jerman yang merupakan koalisi besar Christian CDU dan SPD memiliki kesepakatan utama sebagai arah kebijakan pemerintah koalisi Jerman untuk empat tahun kedepan. Salah satunya adalah penegasan tentang pentingnya reformasi Uni Eropa dan mendorong kerja sama yang lebih erat antara Jerman dan Perancis untuk melindungi Eurozone dari krisis global (Barysch, 2013). Jerman memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas Eropa dari krisis yang terjadi

di dunia. Adapun penekanannya terhadap Turki yang disampaikan presiden Steinmeier mengisyaratkan bahwa Turki memiliki dampak terhadap Uni Eropa baik positif maupun negatif. Perjalanan kerja sama Jerman dan Turki membawa lebih jauh Turki kedalam Uni Eropa dalam kerja sama di berbagai bidang seperti kerja sama dalam bidang ekonomi, energi dan imigrasi (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2011).

Identitas Leitkultur Jerman dan masyarakat Eropa

Leitkultur merupakan pedoman berpikir bagi imigran yang ingin mengintegrasikan diri di Eropa. Secara harfiah letikultur adalah “membimbing budaya” atau “budaya dominan”. Leitkultur menjadi perdebatan besar di Jerman terkait definisi yang jelas dari isi leitkultur itu sendiri. Perdebatan keitikultur muncul pada tahun 2000 yang dipolitisasi oleh Friedrich Merz yang pada saat itu adalah pemimpin kelompok parlementer koalisi partai CDU dan CSU. Pendapat Merz adalah bahwa para imigran yang ingin menetap di Jerman harus beradaptasi dengan leitkultur Jerman. Merz menuntut imigran yang ingin menjadi warga negara Jerman harus beradaptasi dengan budaya dominan yaitu Jerman seperti Sekuler, penggunaan bahasa Jerman dan menerapkan budaya serta nilai nilai Eropa (Beucker, 2016).

Permasalahan yang terjadi dari Leitkultur Jerman adalah saat Seehofer dan Soeder memasukan definisi leitkultur Jerman yang menyertakan tradisi kristen dan yahudi didalamnya. Fakta bahwa kristen telah membudaya dalam kehidupan sosial masyarakat Jerman maka penerapan budaya kristen kedalam leitkultur Jerman adalah

sesuatu yang wajar bagi kelompok tersebut (Seehofer, 2010). Masalah berlanjut karena rata rata imigran di Eropa berasal dari Timur Tengah yang mayoritas beragama islam dan jauh dari leitikultur Jerman. Sebagai masyarakat minoritas, para imigran pasti akan mengikuti konstitusi dan aturan yang ada di Jerman. permasalahannya adalah semakin berkembangnya imigran maka akan menciptakan kekuasaan bagi mereka dan itu menkhawatirkan bagi keberlangsungan budaya asli Jerman (Habermas, 2010).

Leitikultur berkembang dan menjadi pedoman yang dapat membuat masyarakat Eropa mengasingkan para imigran. Hal ini dibenarkan oleh kelompok yang mendukung leitikultur menjadi pedoman di Eropa karena bagi mereka, para imigran yang tidak mau menerapkan leitikultur berarti menolak budaya Eropa dan wajar untuk diasingkan. Pendapatnya ditentang oleh kelompok liberal seperti Merkel yang menganggap bahwa memaksa imigran untuk mengikuti budaya keagamaan dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut Merkel para imigran hanya harus mengikuti nilai dan prinsip serta hukum di Uni Eropa (Shiddiq, 2017).

Perdebatan leitikultur di Jerman membuat Bassam Tibi sebagai penggagas awal leitikultur memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana istilah yang dia ciptakan itu dimaksudkan. Pada awalnya leitikultur yang digagas bukan ditujukan terhadap identitas Jerman namun lebih kepada pencerahan terhadap identitas Eropa. Negara di dunia ketiga ini menurutnya merupakan pembentukan bangsa secara paksa dari beberapa etnis yang menjadi satu negara atau kawasan. Istilah multikulturalisme atau masyarakat paralel suku-agama bukan merupakan alternatif dari integrasi yang

harus diterapkan dalam membentuk bangsa atau identitas negara (Tibi, 2002). Multikulturalisme memerlukan kajian ulang untuk memahami alasan dari komitmen beragama dan paham sekuler. Menurut Tibi, konsep masyarakat paralel justru akan menimbulkan konflik karena masyarakat paralel yang terfragmentasi tidak terhubung oleh konsensus nilai yang dimaksud dalam definisi leitkultur Bassam Tibi (Tibi, 2002).

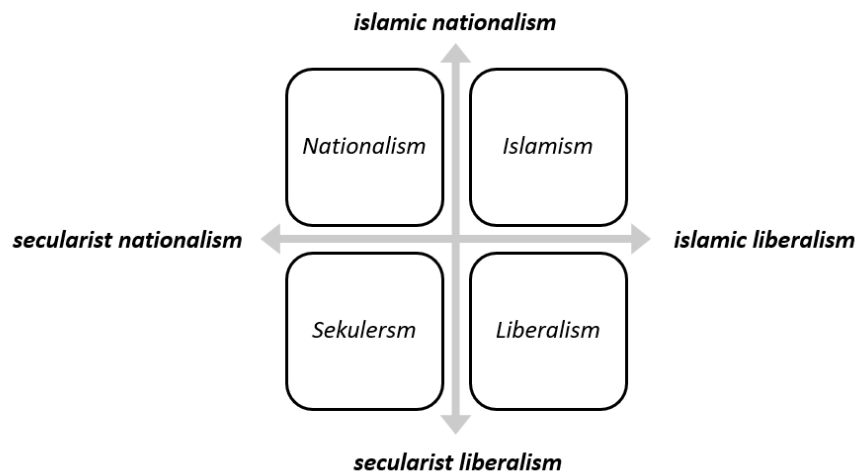
Konsep leitkultur yang didefinisikan Tibi merupakan sebuah nilai idealisme yang menuntut masyarakat dengan pemikiran berbeda untuk memiliki toleransi atas perbedaan yang ada. Meski Tibi mengklarifikasi maksud dari leitkultur itu sendiri, tidak ada solusi yang pasti bagaimana leitkultur dapat menjadi sebuah identitas. Tibi juga menyangkal akan definisi leitkultur yang dipolitisasi di Jerman. Tidak adanya solusi dari Tibi sendiri membuat diskusi leitkultur tetap dalam perdebatan sengit ditataran masyarakat dan pemerintah Jerman. Pesimisme Tibi terkait masyarakat multikultural semakin meyakinkan partai CDU-CSU yang mendefinisikan leitkultur Jerman sebagai identitas kebangsaan dan didalamnya merupakan komponen dari Hukum konstitusi bersama, tradisi budaya, etnis dan agama kristen- yahudi sebagai budaya dominan di Eropa (Seehofer, 2010). Tibi menegaskan bahwa identitas etnis tidak mungkin didapatkan oleh seseorang yang bukan etnis tersebut, seperti orang Turki yang tidak akan mungkin menjadi orang Kurdi (Tibi, 2002).

Pada akhirnya leitkultur Jerman didefinisikan dalam dua pemahaman yang pertama adalah konsep multikulturalisme yang menuntut imigran mengikuti nilai nilai Uni Eropa seperti HAM, demokrasi, dan supremasi hukum dan menciptakan toleransi antar masyarakat. Hal ini telah dijelaskan oleh Tibi akan perlunya kajian

ulang mengenai konsep multikulturalisme itu sendiri. Kedua, leitikultur Jerman yang dipahami merupakan norma, nilai nilai Uni Eropa, budaya, tradisi berdasar agama kristen dan yahudi yang sudah berkembang di Eropa cukup lama. Meski skeptis terhadap imigran, afiliasi budaya tersebut merupakan satu satunya solusi bagi kestabilan di Eropa. Terlepas dari perdebatan yang ada, leitikultur menyikapi imigran dalam satu tujuan yaitu integrasi masyarakat.

2.2.2 Identitas Turki

Identitas Turki terbentuk melalui masa masa reformasi yang dialaminya dalam sejarah, terdapat empat perspektif yang dibenturkan sehingga menciptakan empat ideologi yang berkembang sampai saat ini di Turki, empat perspektif tersebut adalah *Islamism, Nationalism, Secularism, dan Liberalism*. Keempat perspektif tersebut membentuk kelompok kelompok di Turki baik partai atau gerakan masyarakat yang menganut ideologi dari benturan dua perspektif yang menghasilkan *secularist liberalism, secularist nationalism, islamic nationalism, dan islamic liberalism*, dapat dilihat pada gambar 2.1. Masing masing dari kelompok identitas tersebut memiliki gaya politik yang berbeda dan tumpang tindih satu sama lain. Pertikaian antar kelompok dalam menciptakan identitas politik Turki menjadi proses yang membuat Turki mengalami transformasi dalam arah kebijakannya baik dalam maupun luar negeri (Kösebalaban, 2011, hal. 8).



Gambar 1 Empat identitas utama dalam politik Turki, (Kösebalaban, 2011, hal. 8)

Pasca kekalahan pada Perang Dunia I Turki melakukan revolusi dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Revolusi tersebut mengubah Turki dan menciptakan paham yang disebut ‘Eropanisasi’ (Tamin, 2010). Kebijakan dan sistem pemerintahan Turki modern berkiplat kepada negara negara di Eropa meski masyarakat Turki dan Eropa sangat berbeda. Revolusi dilakukan dengan paham nasionalis sekuler karena saat itu para cendekiawan Turki tertarik dengan ideologi yang berkembang di Eropa. Ilmu sains dan sekuler dianggap merupakan cara untuk memajukan suatu negara sedangkan agama tradisional merupakan hambatan terhadap pembangunan serta disintegrasi yang terjadi selama masa Turki Ottoman (Kösebalaban, 2011, hal. 43). Sejak berdirinya Turki modern hak beragama semakin sempit dan gaya pemerintahanya otoriter, sistem hukumnya mengacu pada gaya

Eropa serta ekonomi Turki juga mengalami kemunduran karena sistem kapitalisme yang ada (Mu'ammam, 2016, hal. 138-145).

Setelah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua dan dalam masa Perang Dingin, tidak ada alasan bagi Turki untuk mempertahankan rezim satu partai. Menghadapi ancaman baru dari Uni Soviet, Turki beralih lebih dekat ke Amerika Serikat dan negara-negara Inggris yang lebih senang bekerja dengan pemerintah Turki yang liberal dan demokratis. Di bawah tekanan eksternal ini, CHP menyetujui pemilihan multipartai, yang diadakan pada tahun 1946, yang dilakukan dengan prinsip "pemungutan suara terbuka". Reformasi yang dilakukan pada tahun 1950 memiliki orientasi ideologi sekuler liberal dengan lebih menekankan hubungan dengan negara-negara lain untuk mempertahankan negara dalam masa perang dingin. Upaya sekulerisme yang dilakukan dimasa pemerintahan ini juga tidak lagi ekstrim seperti saat rezim CHP. Pemerintah mulai memurnikan identitas Islam Turki dengan pelonggaran kebijakan terkait keagamaan, memajukan infrastruktur dan aktif dalam politik internasional. Sejarah tersebut yang membuat Turki saat ini menjadi salah satu negara di kawasan Eropa dan menyatakan keinginannya bergabung dalam organisasi di Eropa (Marzaman, 2011, hal. 1-10).

Selama era multipartai setelah pemilu 1950-an, pelonggaran kebijakan-kebijakan politik reguler membuat kelompok-kelompok Islamis menjadi lebih asertif, dan memberikan dukungan elektoral kepada partai-partai liberal (Kösebalaban, 2011, hal. 13). Munculnya Necmettin Erbakan, yang membentuk gerakan nasional, Islamisme memperoleh suara dan kekuatan politik yang independen. Erbakan

menantang prioritas liberal kebijakan luar negeri, mengungkapkan wacana anti-Barat yang kuat, dan menganjurkan persatuan Muslim di bawah kepemimpinan Turki. Fokusnya adalah memperluas cakupan kepentingan pro-Islam ke masalah politik sehari-hari bangsa. Dalam kebijakan luar negeri, Erbakan menyuarakan kritik keras terhadap Barat dan perannya dalam mendukung Israel. Kebangkitan islam dimasa Erbakan ini menciptakan konflik identitas karena gagasannya mengangkat pemikiran tradisionalis yaitu islam vs barat. Gerakan islam nasionalis Erbakan mengakar pada masyarakat, namun dalam tataran pemerintah, militer yang berkuasa masih dalam ideologi sekulernya sehingga Erbakan sulit berkembang diranah politik (Kösebalaban, 2011, hal. 190-192).

Transisi identitas yang terjadi di Turki dilakukan dari nasionalis sekuler ke liberalis sekuler dan berlanjut ke islam nasionalis, namun dari tiga identitas yang terbangun selama ini, ada satu identitas yang tetap bertahan karena telah terbangun selama ribuan tahun yaitu tradisi kebudayaan islam. Keislaman yang ada di Turki merupakan penyebab dari gagalnya paham sekuler yang ada, namun selama itu pula sekuler berkembang sehingga diperlukan adanya keseimbangan yang mampu meredam krisis identitas tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya paham yang disebut *islamic liberalism*. Pada praktiknya islam liberal masih mempertahankan sekuler dan nasionalismenya, meski hal itu tidak memuaskan kelompok sekuler dan nasionalis, *islamic liberal* adalah identitas yang dominan dari pemerintah Turki sampai saat ini.

Pada tahun 2001 beberapa tokoh agamis di Turki membentuk partai baru yang berhaluan islam liberal karena menekankan ideologi demokrasi liberal dan islam konservatif. Partai tersebut adalah *Adelet ve Kalkinma Partisi* (AKP) yang dipimpin oleh Erdogan (Tamara, 2013, hal. 1142) dan mengikuti pemilu pada tahun 2002 sampai memenangkan pemilu tersebut sehingga Erdogan menjadi perdana menteri dari tahun 2003 sampai tahun 2014 yang kemudian menjadi presiden ditahun 2014 sampai saat ini (AK Parti, 2014). Perubahan yang dilakukan oleh partai AKP ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan dunia internasional. Kebijakan-kebijakannya memberikan kemajuan kepada sosial-ekonomi di Turki. Perubahan perubahan yang terjadi merupakan hasil dari perubahan identitas yang dilakukan AKP dengan cara yang demokratis. Turki mengalami reformasi damai saat AKP mulai menguasai pemerintahan (Kösebalaban, 2011, hal. 146).

Islami liberal dari AKP merupakan hasil dari transisi identitas yang gagal, apa yang membuatnya berhasil adalah tidak menghilangkan secara penuh paham sekuler dan nasionalis di Turki. Praktik sekuler dan nasionalis itu masih tetap ada, hanya saja islam liberal menjadi identitas yang dominan. Turki tetap menjadi negara sekuler, namun sekuler yang dijalankan Turki bukanlah sekuler kemalis yang otoriter dan menganggap agama sebagai ancaman bagi kemunduran bangsa. AKP menerapkan sekuler pasif seperti yang dijalankan di Amerika dimana agama dan pemerintah tidak disatukan namun tetap memperjuangkan dan membela kebebasan beragama masyarakatnya baik islam maupun non islam. Sedangkan ideologi nasionalis yang dipertahankan adalah bagaimana AKP melakukan integrasi di dunia internasional

dengan tetap mempertahankan identitas sosial yang otentik Turki, yaitu islam, bahasa, dan tradisi kebudayaan lokal (Kuru, 2009, hal. 176-181).

Turki dimasa AKP ini menjalankan diplomasi islam tegas, yaitu mempertahankan identitas islam di Turki secara tegas meski berusaha meningkatkan kesejahteraan dengan pro barat seperti kebijakan AKP untuk menjadi calon anggota Uni Eropa dengan tetap mempertahankan identitas keislamannya (Kösebalaban, 2011, hal. 8). Islam konservatif itu sendiri merupakan filsafat hidup bagi masyarakat Turki yang mayoritas beragama islam. Liberalisme adalah orientasi Turki dalam menjalankan kebijakan ekonominya, seperti kerja sama ekonomi yang masif dengan negara negara barat. Sedangkan globalisasi sebagai pandangan dalam menjalankan politik luar negerinya, seperti mengirim mesyarakatnya untuk belajar teknologi di negara negara barat. Kebijakan luar negeri Turki ini tetap memicu konflik bagi kelompok sekuler dan nasionalis karena politik luar negeri Turki akan mengancam identitas nasional dan kebebasan beragama akan membangkitkan kelompok nasionalis islam (Kösebalaban, 2011, hal. 146-147).

AKP sejak awal menawarkan kebijakan untuk menjadi anggota Uni Eropa, namun kelompok nasionalis menganggap itu kebijakan yang akan melunturkan identitas Turki. AKP menjalankan diplomasi tegas dengan menawarkan bentuk aliansi peradaban. Bagi AKP bergabung dengan Uni Eropa adalah salah satu cara untuk mempertahankan demokrasi di Turki. AKP memandang bahwa identitas islam tidak mengartikan sebuah negara itu tidak sekuler atau tidak bisa menjadi negara modern. Penawaran sebagai aliansi peradaban Turki terhadap Uni Eropa ini

mencerminkan bahwa Turki mencoba mempertahankan kebanggaan muslimnya dari pada berafiliasi kedalam Uni Eropa. Hal ini cukup menyulitkan Uni Eropa meski negosiasi Turki tetap dibuka pada tahun 2005, kelompok konservatif Uni Eropa yaitu Merkel dan Sarkozy merasa sulit mengikuti permintaan Turki karena Uni Eropa merupakan peradaban tunggal. Selain itu masyarakat Eropa sedang mengalami perkembangan paham anti islamisme dan imigran (Kösebalaban, 2011, hal. 157). Disisi lain Turki tetap berusaha menjadi anggota Uni Eropa dengan terus memenuhi syarat yang diberikan Uni Eropa. Keinginan Turki dalam integrasi di Uni Eropa setidaknya membawa dampak positif terhadap kemajuan sosial-ekonomi dan demokrasi.

Kepemimpinan Erdogan yang memberikan perubahan besar di Turki ternyata menyulut perlawanan dari pihak militer karena kekuasaannya semakin menyusut. Pada tanggal 18 Juli 2016 militer melakukan kudeta untuk menurunkan Erdogan dari puncak kepemimpinan. Kudeta tersebut digagalkan oleh masyarakat Turki. Gagalnya kudeta tersebut ternyata menyulut semangat pemerintah dalam melakukan reformasi di Turki. Turki dinyatakan berada dalam keadaan darurat selama tiga bulan dan Erdogan bersama pemerintah saat itu menangkap orang-orang yang dituduh menjadi dalang atau mendukung kudeta kurang lebih 50.000 orang. Tahanan diduga mengalami tindak kekerasan saat diinterogasi, sikap pemerintah setelah terjadi kudeta inilah yang membuat dunia internasional mengkritik kebijakan Erdogan yang dinilai melanggar HAM (Pujayanti, 2016).

Pada tanggal 16 April 2017 pemerintah Turki melakukan referendum untuk mengubah konstitusi. Pemerintah berusaha mengubah sistem pemerintahan yang lebih efisien dengan memperjelas posisi eksekutif, legislatif dan yudikatif, referendum tersebut mengusulkan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Konstitusi baru tersebut memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden karena fungsi Perdana menteri digabungkan dengan presiden. Referendum tersebut resmi berlaku dan Turki telah menjalani reformasi politik dengan sistem presidensial dan diikuti perubahan sistem lainya karena dalam sistem pemerintahan (Daily Sabah Centre , 2017).

Arah politik luar negeri Turki semakin aktif dalam permasalahan internasional seperti keterlibatannya dalam perang di Timur Tengah. Erdogan mulai meluaskan kerjasamanya dengan negara negara di luar Eropa seperti Iran dan Brazil. Pergerakan Erdogan dalam politik luar negerinya terlihat mencari alternatif dalam menjalin kerja sama agar tidak selalu bergantung dengan Uni Eropa (Marzaman, 2011, hal. 8-10). Fakta tersebut memperlihatkan perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Turki yang sebelumnya fokus pada integrasi dengan Uni Eropa. Robert Gates, menteri pertahanan luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa perubahan orientasi Turki tersebut dikarenakan lambatnya Uni Eropa merespon keanggotaan Turki (Kösebalaban, 2011, hal. 159).